

**ANALISIS KINERJA SUBBIDANG KETAHANAN
KELUARGA
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA KOTA PEKANBARU**

Wazni, Wan Asrida

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Riau

ABSTRAK

Ketahanan keluarga merupakan penopang pembangunan bangsa. Oleh karena itu, perhatian yang lebih terhadap ketahanan keluarga dianggap penting untuk dilaksanakan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru telah mengamanahkan kepada Bidang Perempuan khususnya Subbidang Ketahanan Keluarga untuk mengimplementasikan kebijakan ketahanan keluarga tersebut. Kinerja Subbidang Ketahanan Keluarga selama satu tahun (sejak 2012) dinilai baik. Program-program yang direncanakan berjalan lancar. Namun, dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, baik pengurus maupun kader pada umumnya.

Keywords: *Ketahanan keluarga, Politik perempuan dan Partai politik*

A. Latar Belakang

Pembinaan keluarga merupakan langkah penting yang akan menentukan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Akselerasi sosial yang terjadi akibat modernisasi dan urbanisasi memang menantang nilai-nilai keluarga (*family values*), karena manusia kini telah dikotak-kotakkan sebagai satu unit kecil dari sebuah mesin raksasa produksi. Sebagian warga telah mengalami keterasingan dan hidup dalam bingkai sosial yang retak, mereka hanya dihargai keringat dan keterampilannya belaka, sedang kebutuhan batin dan sosialnya terabaikan sama sekali. Bila kondisi alienasi itu dibiarkan terus berlanjut, maka akan memunculkan gejala tersendiri, sekurang-kurangnya akan memperbesar penyimpangan dan kerawanan sosial. Untuk mencegah dan meredam problema sosial itu, maka kondisi keluarga harus dimantapkan dalam iklim sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi). Keluarga turut berperan sebagai jaring pengaman sosial dengan memacu dan melesatkan aspek kreatif/produktifnya, agar penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran bisa dimulai dari institusi



terkecil. Keluarga yang mandiri dan berdaya benar-benar menjadi tumpuan harapan masyarakat, bukan semata beban yang harus ditanggung negara.

Pasca Pemilu 2009, Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru mengimplementasikan proses kaderisasi perempuan yang telah diatur secara terpusat dari Dewan Pimpinan Pusat hingga Dewan Pimpinan Ranting. Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru memiliki struktur bidang perempuan yang berjumlah 5 (lima orang pengurus perempuan) yang terdiri dari atas 3 subbidang, yaitu:

1. Subbidang Ketahanan Keluarga. Bidang ketahanan keluarga memiliki program yang sarannya adalah kader dan masyarakat umumnya. Di antara programnya adalah Pelatihan Keluarga Samara (Sakinah, Mawaddah wa Rahmah), Pelatihan Komunikasi Suami-Istri, pelatihan konselor keluarga, seminar keluarga dan mendirikan PAUD (pendidikan anak usia dini). Selain itu, pembinaan anak kader diimplementasikan dengan mengadakan program Daurah Quran Anak Kader. Program ini bertujuan menggiring anak kader untuk ikut dalam proses tarbiyah atau kaderisasi. Sedangkan yang merawat kaderisasi anak kader tersebut merupakan tanggung jawab Bidang Kaderisasi dan Bidang Perempuan.
2. Subbidang Peningkatan Kapasitas. Programnya antara lain penokohan kader dan Pos Wanita Keadilan. Program penokohan kader masih belum berjalan secara maksimal. Dewan Pimpinan Daerah baru menginventarisir data kader-kader yang dianggap layak untuk dijadikan tokoh dari masing-masing Dewan Pimpinan Cabang. Pos Wanita Keadilan sudah terbentuk di setiap kecamatan dan kelurahan. Hanya saja, kegiatan-kegiatannya masih belum berjalan secara maksimal.
3. Subbidang Kajian Perempuan, Anak dan Keluarga. Programnya antara lain evaluasi dan survey tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kajian perempuan, anak dan keluarga. Program ini sudah berjalan walaupun belum maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengkaji bagaimana kinerja Bidang Perempuan khususnya Subbidang Ketahanan Keluarga Partai Keadilan Sejahtera. Maka penelitian ini berjudul: Analisis Kinerja Subbidang Ketahanan Keluarga Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, penulis akan mengangkat permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian: Bagaimana Kinerja Subbidang Ketahanan Keluarga Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru.?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui Kinerja Subbidang Ketahanan Keluarga Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru.



Kegunaan

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan bagi kajian ilmu politik, khususnya kajian tentang partai politik dan politik perempuan.
2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi partai politik sebagai referensi dan informasi dalam melakukan peran dan fungsinya.
3. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perempuan sebagai referensi dan informasi dalam menjalankan kiprahnya di dunia politik
4. Sebagai bahan informasi bagi kajian-kajian selanjutnya yang berkaitan dengan partai politik dan politik perempuan tentunya dari sudut penelaahan yang berbeda.

D. Konsep Teoritis

1. Kinerja

Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang/organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan (Mangkunegara dalam Joniwar dan Meyzi Heriyanto, 2012). Seseorang atau organisasi dikatakan memiliki kinerja yang baik atau tinggi manakala orang atau organisasi tersebut memiliki prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Maksudnya adalah bahwa seseorang atau organisasi dalam melakukan kinerjanya dituntut menggunakan kemampuan, keterampilan dan pemahaman terhadap tugas yang diberikan kepadanya, agar kinerjanya dapat ditingkatkan. Untuk ini perlu ketekunan seseorang/organisasi dalam bekerja dan harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Tidak hanya itu, lingkungan tempat bekerja atau lingkungan organisasi serta sarana dan prasarana harus mendukung.

2. Politik Perempuan dan Keluarga

Dunia politik adalah dunia kekuasaan paling konkrit. Di sinilah terjadi persaingan dari tingkat paling lunak sampai paling keras. Dan karena perempuan jarang melewati tahap-tahap berpolitik ini, "etos kerja" politiknya rendah. Politik terlalu sederhana untuk dijadikan profesi karena di dalamnya terdapat sejumlah kepentingan. Politik lebih indah disebut perjuangan. Di dalamnya ada berbagai nuansa pembelaan terhadap hak-hak orang tertindas. Politisiperempuan, tak terkecuali harus melakukan hal serupa.

Paling tidak pembelaan ini diwujudkan dalam bentuk perhatian anggota legislatif perempuan terhadap nasib perempuan. Suara nyaring dari kelompok ini dirasakan masih jarang. Paling tidak ada dua kemungkinan realitas ini. *Pertama*, bahwa para politisi perempuan lebih mencerminkan cita-cita partainya daripada kepentingan-kepentingan kaum perempuan. Kehadiran mereka di legislatif tidak dirasakan sebagai wakil kaum perempuan. Sehingga tidak ada hal yang mendorong dirinya secara serius dalam memperjuangkan nasib perempuan. *Kedua*, karena ketidaktahuan wacana perempuan dalam realitas masyarakat. Banyaknya anggota legislatif yang tidak berlatar belakang politik adalah kendala utama dalam mekanisme dan tata kerja legislatif dalam memperjuangkan hak-hak

perempuan. Untuk itu, budaya nepotisme benar-benar dihapuskan. Dengan kata lain, perlu dicari perempuan-perempuan yang siap berjuang dan paham wacana perempuan dalam panggung politik. (Dadang S. Anshori dkk, 1997: 3-11).

Isu gender acap ditampilkan dalam suasana kontradiktif. Padahal, posisi perempuan dan lelaki tak semestinya dipertentangkan, karena kedua komponen sosial itu memainkan peran yang sama pentingnya. Bahkan, energi sosial akan mencapai puncaknya bila terjadi sinergi di antara kedua jenis itu. Untuk itu, wacana kesetaraan dan kemitraan yang dinamis antar jenis harus lebih kerap dimunculkan sebagai bagian dari solusi masalah sosial yang akut. Kemitraan antar jenis perlu diterapkan dalam lingkungan keluarga antar suami-isteri dan anak lelaki-perempuan, sehingga keluarga menjadi miniatur dari sistem sosial yang menghargai perbedaan peran. Dalam lingkup lebih luas, kemitraan itu juga digalang di sektor publik melalui pembagian peran yang adil dan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Afirmasi kebijakan yang memberi peluang lebih besar kepada jenis perempuan patut diapresiasi, namun tetap dalam koridor pemenuhan tugas secara profesional dan proporsional. Jangan sampai afirmasi yang berlebihan justru menghasilkan masalah baru berupa ketegangan sosial yang mengancam keutuhan keluarga atau harmoni warga.

E. Hasil dan Pembahasan

Sebagai suatu organisasi, partai politik berfungsi untuk memfasilitasi integrasi kolektif-sosial. Partai politik tersusun dari individu dan grup sosial. Masing-masing individu dan grup sosial ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda satu dengan yang lain. Organisasi partai politik perlu didesain sedemikian rupa agar tercipta integrasi antarindividu dan kelompok masyarakat. Proses integrasi ini dapat menggunakan dua mekanisme. Pertama dengan menggunakan mekanisme kontrol internal. Mekanisme kontrol internal ini dilakukan dengan membuat peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota partai politik. Misalnya dengan menyusun Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, *reward dan punishment* partai politik. Tujuan utamanya agar terbentuk perilaku yang sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi partai politik. Mereka yang tidak sesuai dengan ketentuan organisasi akan mendapat sanksi. Sementara mekanisme yang kedua untuk integrasi dapat dilakukan dengan melalui fungsi koordinasi. Berbeda dengan mekanisme kontrol, koordinasi dilakukan dengan menghubungkan satu individu dan grup dengan yang lainnya. Koordinasi ini tidak dilakukan dengan cara memaksa (*coercive*), tetapi hanya memfasilitasi. Berbeda dengan kontrol, koordinasi tidak disertai pemberlakuan sanksi kepada mereka yang tidak melakukannya. Misalnya, mekanisme komunikasi dan saling berbagi informasi yang didesain oleh partai politik merupakan beberapa contoh yang dapat dilakukan dalam hal ini. Tujuan utama dalam proses koordinasi adalah adanya keterkaitan (*linkage*) antara satu individu dan kelompok dengan lainnya. Sehingga gerak dan aktivitas partai politik dapat dilakukan secara simultan dan mendapat dukungan dari semua pihak.

Organisasi partai politik mengintegrasikan para anggotanya, baik individu maupun kelompok, dengan ikatan ideologis. Terdapat suatu sistem nilai dan tujuan politik yang menyatukan dan menginspirasi cara organisasi dalam melakukan integrasi. Partai politik adalah organisasi yang mengelola

ideologi. Ideologi tidak hanya ditempatkan sebagai tujuan, tetapi juga sebagai ikatan sosial. Pihak-pihak yang berada dalam tubuh partai atau yang bukan partai akan melihat kesesuaian ideology. Mereka yang merasakan adanya kesesuaian ideologis antara individu dengan partai politik, pastilah berniat untuk bergabung. Begitu juga sebaliknya, apabila si individu melihat adanya perbedaan yang cukup besar antara ideologi yang mereka miliki dengan partai politik, dia akan menjauh, bahkan “melawan” partai politik tersebut.

Kader yang dibangun atas dasar “pribadi muslim” dan “pribadi jama’ah” (*syakhshiyah Islamiyah* dan *syakhshiyah jama’iyah*) tidaklah mencukupi untuk mengusung program-program *Jamahirriyah* (publik). Dalam hal ini perlu dikembangkan satu kepribadian lagi yaitu “pribadi professional” (*syakhshiyah hadhariyyah*) atau “pribadi politik” (*syakhshiyah siyasah*). Sebagai kebutuhan atas keterbukaan dan transparansi partai.

Beberapa aktifitas dakwah terlalu mengandalkan kredibilitas moral dan kredibilitas organisasional secara internal, menjadikan pengelola dan pengelolaan partai tidak populer. Mungkin ini disebabkan karena secara internal, mempercayai dan dipercayai merupakan suatu hal yang membudaya, sehingga tidak memperhatikan hal-hal teknis dan pembangunan citra secara profesionalitas. Akhirnya, ketika bergerak secara terbuka menjadi canggung. Atau malah sibuk mendefinisikan arti “riya”.

Sebagai organisasi modern tentunya memiliki mekanisme keorganisasian yang baku yang telah disepakati. Baik mekanisme administrasi, ataupun mekanisme pengambilan keputusan. Dalam hal yang terakhir, Majelis Syura telah mengeluarkan “Panduan Pengambilan Keputusan” sebagai acuan. Di samping produk-produk yang lain seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Kader partai seharusnya mengikuti semua produk partai sebagai wujud profesionalitas berorganisasi.

Kalau pada fase sebelumnya sebuah keputusan dapat disandarkan kepada nash-nash secara letterlijk, maka dalam fase keorganisasian sebuah keputusan seyonyanya melalui tahapan mekanisme yang telah disepakati. Wajib mengambil mekanisme pengambilan keputusan dan komitmen atas keputusan-keputusannya, adalah hal yang sangat penting. Maka dari itu diperlukan kesiapan pada seluruh mekanisme keorganisasian agar mengacu kepada aturan-aturan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara organisatoris. Yaitu berdasarkan mekanisme keorganisasian dengan segala prosedur dan perangkatnya.

Di lain pihak, ada kewajiban yang ditanggung dalam hal pembelajaran, pengajaran dan pengalangan partisipasi masyarakat luas tentang sebuah keputusan agar masyarakat mengetahui sekaligus merasa terlibat di dalamnya. Sedangkan masyarakat luas yang tidak ikut dalam mekanisme keorganisasian dan tidak ikut dalam memutuskan satu perkara, mereka akan dapat mengetahui keputusan dan seluruh mekanismenya melalui “aturan baku” yang tertulis dalam “dokumen tertulis” yang dikeluarkan oleh partai secara terbuka agar mudah untuk dibaca dan dimengerti oleh masyarakat. Hal tersebut tentu juga berlaku pada Subbidang Ketahanan Keluarga Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru.

Program Ketahanan Keluarga telah berjalan di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru memiliki Bidang Perempuan dengan ketua bidang yaitu Yulia Roza,



A.Md yang mengarahkan Subbidang Ketahanan Keluarga bekerja semaksimal mungkin selama lebih dari satu tahun kepemimpinannya. Rumah Keluarga Indonesia Kota Pekanbaru telah berdiri dengan ketua Aida Malika, S.Pi.Launching Rumah Keluarga Indonesia juga telah dilakukan di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Tampan.

Daurah Quran yang merupakan salah satu bentuk kegiatan daurah anak kader telah dilaksanakan sebelum bulan Ramadan. Daurah Quran diikuti oleh anak usia sekolah Kelas 4 Sekolah Dasar sampai Kelas 12 Sekolah Menengah Atas.

Daurah Anak Kader dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk membangkitkan gairah anak kader terhadap da'wah. Berusaha menggali potensi besar yang ada didalam diri mereka, berusaha memperkenalkan dunia tarbiyah kepada mereka, dan berusaha mendekatkan mereka pada kegiatan yang positif, tentunya peran orangtua sangat diharapkan untuk memberikan dukungan yang sangat besar dan positif, karena yang sangat menginginkan kesholehan sosial bukan hanya kesholehan pribadi. Motivasi juga sangat diharapkan kepada kader untuk melihat kembali, bahwa Da'wah ini membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa untuk menghasilkan hasil yang menyeluruh, Anak Kader adalah point terpenting yang harus dijaga, agar terlihat hubungan yang bersinergi antara orangtua dan anak.

Dalam perjalanan kehidupannya, setiap kader akan melewati fase keluarga. Keluarga merupakan tahap lanjutan setelah pembentukan pribadi muslim, dan menjadi langkah antara menuju pembentukan masyarakat muslim. Maka keluarga di sini, memiliki fungsi utama.Pertama, menjadi wadah bagi pengokohan kepribadian para kader.Kedua, menjadi sarana pengembangan dakwah ke masyarakat.

Oleh karena itu, dengan sarana keluarganya, para kader harus berupaya mengembangkan dakwah ke tengah masyarakat.Kepada keluarga besar, tetangga, teman profesi dan yang lainnya.Perhatian yang lebih besar terhadap ketahanan keluarga mutlak diperlukan.Jangan sampai kondisi keluarga justru menjadi kendala bagi peran-peran dakwah atau justru menjadi pengikis bagi kepribadian Islam para kader.Perencanaan, pengembangan keluarga dari berbagai sisi harus dilakukan, sehingga keluarga para kader bisa menjadi keluarga teladan di tengah-tengah masyarakat.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki potensi yang besar dalam hal sumberdaya manusia. Terlebih lagi, Indonesia tengah mengalami apa yang disebut dengan "bonus demografi" di tahun 2010-2035. Bonus demografi adalah istilah kependudukan untuk menggambarkan tersedianya jumlah angkatan kerja atau penduduk produktif sangat tinggi (usia 15-64 tahun) di satu negara.

“Tingkat kelahiran di Indonesia stagnan sejak 2002 hingga 2007 yakni di angka 2,6. Kondisi ini yang menyebabkan adanya potensi bonus demografi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2030-an. Namun, kalau angka kelahiran turun, bonus demografi itu kemungkinan mundur waktunya,” ungkap Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr.Sudibyo Alimoeso, MA dalam acara Seminar Hari Keluarga bertajuk "Memanfaatkan Generasi Emas untuk Mewujudkan



Ketahanan Keluarga", Sabtu (2/6) di Auditorium Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Darmaga. Kegiatan ini diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Ilmu Keluarga dan Konsumen dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia IPB.

Dr.Sudibyو mengatakan 'bonus demografi' yang akan dialami Indonesia bisa menjadi peluang positif, sepanjang kebijakan-kebijakan yang bagus terus dipertahankan. "Jika konsisten dan tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang baik, bonus demografi bisa menjadi peluang, bukan ancaman," ujar Dr. Sudibyو. Saat ini jumlah penduduk Indonesia produktif mencapai 120 juta orang dari seluruh penduduk Indonesia.Dari jumlah tersebut, penduduk yang bekerja banyak sekali.Tingkat pengangguran diharapkan terus menurun, dan diharapkan mencapai titik ideal di bawah tujuh persen.Dr.Sudibyو menambahkan BKKBN juga berupaya meningkatkan dan mendorong terciptanya keluarga berkualitas.Dia berharap 'bonus demografi' ini bisa menjadi landasan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia.

Pakar Ketahanan Keluarga dan **staf pengajar Fakultas Ekologi Manusia IPB** Dr.Euis Sunarti menyampaikan hasil kajian akademis terkait upaya peningkatan ketahanan keluarga. "Kita melakukan survei kecil-kecilan tentang makna keluarga dari para hadirin.Dari survei terungkap bahwa semua responden menganggap keluarga mempunyai arti sangat penting dalam hidup.Hal ini akan menjadi modal sosial berharga dalam menjalani hidup," kata Dr.Euis setelah membacakan hasil survei.

Keluarga adalah unit dasar dari masyarakat yang akan memberikan pengaruh pada kehidupan sosial masyarakat dan kesehatan masyarakat. Namun, fakta menunjukkan bahwa saat ini lebih banyak masyarakat yang mempengaruhi keluarga daripada keluarga yang mempengaruhi masyarakat. Demikian salah satu poin yang disampaikan oleh **Dr. Euis Sunarti**, Kamis, 28 Juni 2007 pada diskusi pakar dalam rangka Hari Keluarga, yang diselenggarakan oleh Bidang Kewanitaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam diskusi yang dihadiri oleh staf bidang kewanitaan DPP PKS itu, Dr. Euis menjelaskan bahwa bangunan keluarga adalah bangunan yang mudah rapuh kalau tidak didukung oleh *support system* yang mumpuni. Oleh karena itu, negara seharusnya bertanggung jawab dalam memberikan kondisi yang menguntungkan untuk ketahanan keluarga.Yaitu dengan memberikan jaminan lingkungan dan sarana sarana yang menguatkan.Misalnya dengan memberikan sarana transportasi yang ramah keluarga, lingkungan perumahan yang menguntungkan untuk harmonisasi keluarga, maupun fasilitas bermain yang sesuai dengan perkembangan anak.Sayangnya, pemerintah Indonesia saat ini belum banyak memberikan kondisi yang kondusif untuk ketahanan keluarga.Contoh kasus, tidak sedikit keluarga keluarga Indonesia yang karena kebutuhan ekonomi, terpaksa harus hidup berpisah dengan keluarga."Bagaimana ketahanan keluarga dapat dibangun kalau anggota keluarga hidup terpisah" kata ibu dari putra empat ini miris. Akibatnya, tidak sedikit keluarga keluarga yang tadinya berkomitmen untuk menjaga ketahanan keluarga menjadi luntur akibat desakan kebutuhan lain yang lebih kuat.

Selain itu, dosen yang juga rajin membuat buku ini, mengatakan bahwa pemberdayaan keluarga merupakan hal yang penting dalam membangun ketahanan keluarga.Pemerintah Indonesia saat ini memang lebih banyak



melakukan pemberdayaan keluarga dari sisi ekonomi. Namun sayangnya, kata Dr. Euis, dalam hal tersebut, pendampingannya sangat kurang. Akibatnya program pemberdayaan ekonomi keluarga tidak memberikan hasil yang optimal.

Poin lain dalam ketahanan keluarga adalah memberdayakan keluarga dalam hal pengambilan keputusan. Setiap anggota keluarga seharusnya terakses dengan informasi dan pengetahuan sehingga dapat mengambil keputusan dengan sebaik baiknya. Misalnya, apapun aktivitas dan profesi yang dipilih oleh seorang istri, apakah ingin berkarir tapi tetap menjadi keseimbangan peran dalam keluarga atau ingin sebagai ibu rumah tangga yang berkualitas, haruslah benar benar didasarkan pada informasi dan pengetahuan yang memadai. Terkait dengan hal tersebut, Dr. Euis menambahkan, bahwa keputusan untuk bekerja di lingkungan publik pada masyarakat Indonesia saat ini terbagi dua. Pada masyarakat bawah, istri yang bekerja bukanlah sebuah keputusan optional, mereka mau tidak mau harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan bagi masyarakat menengah atas, umumnya keputusan itu merupakan pilihan.

Akhirnya, ketahanan keluarga Indonesia saat ini memang masih menjadi persoalan yang tidak kecil. Namun, Dr. Euis memberikan harapan bahwa di setiap persoalan, pasti ada pihak pihak yang menjadi counter part atau yang concern terhadap masalah ini. Mereka melawan arus dan berupaya untuk memberikan perbaikan pada kondisi yang ada. Oleh karena itu, Dr. Euis menyarankan, agar kita dapat memperkuat pihak-pihak *counter part* tersebut. Sehingga, persoalan ketahanan keluarga yang begitu banyak tidak berlarut larut dan ada jalan untuk memberikan perbaikan yang ke arah yang positif bagi ketahanan keluarga. Semoga! Wallohu'alam bishowab.

Pada masa perang kemerdekaan melawan penjajah, bangsa Indonesia dikenal memiliki karakter yang kuat. Hal itu, dilihat dari keberanian yang luar biasa untuk melawan penjajah meski berbekal senjata seadanya, yaitu bambu runcing. Dengan slogan “merdeka atau mati”, para pejuang Indonesia siap bertempur memperjuangkan kebebasan dan harga diri bangsa. Tiada keluhan dan tiada berpangku tangan, meski sumber daya sangat terbatas. Bandingkanlah dengan kondisi karakter bangsa saat ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tak seiring dengan semakin kuatnya karakter bangsa, justru sebaliknya. Benih-benih memudarnya kekuatan karakter bangsa sudah nampak. Korupsi yang tak habis-habis, maraknya tawuran remaja maupun tawuran warga, perang antar suku, budaya suap menyuap, dan banyaknya pelajar/mahasiswa yang menjadi penyalahguna narkoba adalah sejumlah indikator yang menunjukkan mulai melemahnya karakter bangsa Indonesia. Mengapa ini terjadi?

“Tak dipungkiri kekuatan karakter bangsa Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan berasal dari kuatnya ketahanan keluarga para pejuang kemerdekaan. Karakter keluarga berbanding lurus dengan karakter bangsa. Jika karakter keluarga kuat maka karakter bangsapun akan kuat. Sementara kondisi saat ini, ketahanan keluarga Indonesia mulai berada dalam ambang kerapuhan”, kata Anis Byarwati, Ketua Bidang Perempuan DPP Partai Keadilan Sejahtera, Minggu (23/6/2013).

Lebih lanjut, Anis menguraikan bahwa di masa perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki Cut Nyak Dien, seorang srikandi Aceh yang sejak muda telah berjuang melawan Belanda bersama suaminya. Kekompakan dalam



berkeluarga dan kesamaan dalam perjuangan telah menjadi inspirasi dan semangat yang kuat bagi Cut Nyak Dien untuk tidak pantang menyerah melawan penjajah Belanda. Begitu pula dengan keluarga KH. Ahmad Dahlan, keberhasilannya dalam mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat tidak luput dari peran aktif istrinya, Siti Walidah dalam menguatkan ketahanan keluarganya dan berperan aktif dalam perjuangan.

Bandingkan dengan kondisi keluarga Indonesia saat ini. Anis mengutip data dari Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) yang mencatat bahwa sejak 2005 angka perceraian di Indonesia meningkat di atas 10% setiap setahunnya. “Bahkan data dari hasil konsultasi klien psikolog menyebutkan 3 dari 10 pernikahan di Indonesia berakhir dengan perceraian”, jelas Anis penuh keprihatinan. “Saat ini keluarga Indonesia mengalami terpaan ujian. Oleh karena itu, menjadi komitmen kita, anak-anak bangsa untuk berjuang mengokohkannya”, ujar Anis lagi.

Anis mengatakan keluarga adalah wahana penopang bangsa. Keluarga adalah entitas sekaligus aset vital yang perlu diayomi, ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya, karena keluarga adalah rumah jiwa bangsa. Oleh karena itu, dalam rangka memaknai Hari Keluarga Nasional (HKN) 2013, Bidang Perempuan PKS kembali mengajak semua masyarakat dan elemen bangsa untuk bersama-sama bergandengan tangan memperkuat ketahanan keluarga Indonesia. “Tidak kata terlambat untuk memulai sebuah kebaikan, termasuk tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah upaya memperkuat simpul simpul ikatan dalam keluarga, bangsa tanpa keluarga bagaikan bangunan mewah tak berjiwa. Keluarga tanpa perlindungan negara juga bagaikan rumah renta dilanda badai”, tutup Anis.

Perempuan PKS sendiri, sejak beberapa tahun belakangan ini, secara aktif telah melakukan berbagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga Indonesia di tingkat akar rumput. Melalui Program Keluarga Berkualitas, Perempuan PKS di seluruh Indonesia telah mendirikan Rumah Keluarga Indonesia (RKI), sebuah wadah bagi keluarga Indonesia untuk melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan mengikat simpul-simpul keharmonisan keluarga.

Selain itu, perempuan PKS juga telah memiliki program Pos Ekonomi Keluarga (Pos EKa) yang bertujuan meningkatkan ekonomi keluarga Indonesia. RKI dan Pos EKa telah berdiri di 33 provinsi di Indonesia. Hal yang tak kalah penting yang sudah dilakukan oleh perempuan PKS adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan keluarga. Sosialisasi ini telah dilakukan di lebih dari 20 provinsi di Indonesia.

PENUTUP

Subbidang Ketahanan Keluarga Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru yang dikoordinasikan oleh Ketua Bidang Perempuan Yulia Roza, A.Md telah membentuk Rumah Keluarga Indonesia yang diketuai oleh Aida Malika, S.Pi. Selain itu, Daurah Quran merupakan program dari Daurah Anak Kader juga telah diselenggarakan dalam satu tahun masa jabatannya (sejak tahun 2012) sebagai Ketua Bidang Perempuan. Kegiatan ini akan tetap berlangsung, karena Program Ketahanan Keluarga adalah program tertulis yang

berlaku secara kader dan seluruh tingkat organisasi kepartaian. Mulai dari Dewan Pimpinan Pusat sampai Dewan Pimpinan Ranting. Agar Subbidang Ketahanan Keluarga dapat meningkatkan kinerjanya, dianggap perlu untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, baik dari pengurus maupun dari kader. Selain itu, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program perlu dukungan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi Takariawan. *Fikih Politik Perempuan*. Solo, Era Intermedia, 2003
- Dadang S. Anshori dkk. *Membincangkan Feminisme; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung, Pustaka Hidayah, 1997
- Lexi J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Reformasi*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2011
- Joniwar dan Meyzi Heriyanto. *Analisis Efektivitas Kinerja Penyuluh Lapangan* dalam Jurnal Administrasi Pembangunan Volume 1, Nomor 2, November 2012.
- Nur Iman Subono. *Perempuan dan Partisipasi Politik*. Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, 2003
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta, 2004
- Wazni. *Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Islam*. Skripsi, Pekanbaru, 2006
- , *Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan oleh Partai Politik di Kota Pekanbaru pada Pemilu 2009: Kasus Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera* dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda Vol.10, No.16/ 2011
- , *Strategi Kaderisasi Perempuan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru Tahun 2009-2012*. Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda Vol.11, No. 17/2012.

Artikel

- Perempuan PKS Nilai Keluarga Indonesia Rapuh dalam <http://nasional.inilah.com/read/detail/2003099/perempuan-pks-nilai-keluarga-indonesia-rapuh> diakses 29 Agustus 2013 pukul 3:29 wib.
- [Diskus Pakar Bidang Kewanitaan DPP PKS Dalam Menyambut Hari Keluarga](http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/diskus-pakar-bidang-kewanitaan-dpp-pks-dalam-menyambut-hari-keluarga/) dalam <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/diskus-pakar-bidang-kewanitaan-dpp-pks-dalam-menyambut-hari-keluarga/> diakses 29 Agustus 2013 pukul 3:40 wib
- Memfaatkan Generasi Emas Untuk Ketahanan Keluarga dalam <http://m.merdeka.com/berita-kampus/memanfaatkan->



[generasi-emas-untuk-ketahanan-keluarga-generasi-emas.html](#)
diakses 29 Agustus 2013 pukul 4:32 wib

